LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

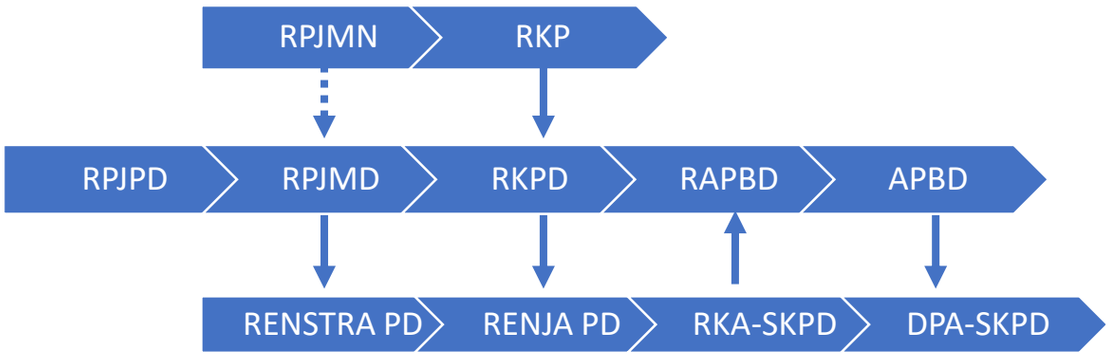
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
diperhatikan
dipedomani dan/atau diacu
dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
44. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
49. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;

b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 pada tahun ke-2 (ke dua) periode tahun 2025; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui capain kinerja program / kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023, serta pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Tahun 2024 Tribulan II
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan (output) /Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan II (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10		11=(10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup**	**81**	**%**	**80,5**	**80,5**	**80**	**99%**	**80,5**	**40**	**%**	**50%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dok	8 dok	8	8	100%	8 dok	3	dok	38%
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dok	5 Dokumen	5	5	100%	5 Dokumen	2	dok	40%
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Lap	5 Laporan	5	5	100%	5 Laporan	4	Lap	80%
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Lap	12 Laporan	12	12	100%	12 Laporan	6	Lap	50%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup	8	lap	8 lap	8	7	88%	8 lap	4	lap	50%

2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94	Org/bln	94 Orang/bulan	94	92	98%	94 Orang/bulan	94	Org/bln	100%
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1 Laporan	1	1	100%	1 Laporan	0	Lap	0%
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Lap	6 Laporan	6	6	100%	6 Laporan	3	Lap	50%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang kepegawaian	94	pegawai/org	94 pegawai/org	94	92	98%	94 pegawai/org		pegawai/org	0%
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94	Paket	94 Paket	94	92	98%	94 Paket	94	Paket	100%
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	20 Orang	20	15	75%	20 Orang	10	Orang	50%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	8	lap	8 lap	8	8	100%	8 lap	4	lap	50%
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	Paket	25 Paket	25	24	96%	25 Paket	15	Paket	60%
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	5 Paket	5	5	100%	5 Paket	3	Paket	60%
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43	Paket	43 Paket	43	42	98%	43 Paket	35	Paket	81%
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	4 Paket	4	4	100%	4 Paket	2	Paket	50%
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	24 Dokumen	24	19	79%	24 Dokumen	12	Dokumen	50%
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Lap	12 Laporan	12	12	100%	12 Laporan	6	Lap	50%
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap	12Laporan	12	12	100%	12Laporan	6	Lap	50%
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	Dokumen	5 Dokumen	5	4	80%	5 Dokumen	3	Dokumen	60%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan LH Terpenuhi	14	unit	14 unit	14	14	100%	14 unit	7	unit	50%
2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6	Unit	6 Unit	6	6	100%	6 Unit	3	Unit	50%
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	4 Unit	4	4	100%	4 Unit	2	Unit	50%
	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	1	unit	1 unit	1	0	0%	1 unit	0	unit	0%
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	3 Unit	3	2	67%	3 Unit	3	Unit	100%
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	5 Unit	5	4	80%	5 Unit	5	Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Urusan Dinas Sesuai Tujuan Organisasi	3	dok	3 dok	3	3	100%	3 dok	3	dok	100%
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	1 Laporan	1	1	100%	1 Laporan	1	Lap	100%
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Lap	4 Laporan	4	4	100%	4 Laporan	4	Lap	100%
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	12 Laporan	12	12	100%	12 Laporan	6	Lap	50%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan LH	50	unit	50 unit	50	48	96%	50 unit	25	unit	50%
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1 Unit	1	1	100%	1 Unit	1	Unit	100%
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	30 Unit	30	25	83%	30 Unit	20	Unit	67%
2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5	Unit	5 Unit	5	5	100%	5 Unit	3	Unit	60%
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	25 Unit	25	22	88%	25 Unit	20	Unit	80%
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2 Unit	2	1	50%	2 Unit	1	Unit	50%

2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1 unit	1	1	100%	1 unit	1	unit	100%
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun**	**80**	**%**	**80%**	**80**	**80**	**100%**	**80%**	**30**	**%**	**38%**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun	2	dok	2 dok	2	2	100%	2 dok	0	dok	0%
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	Dokumen	1 Dokumen	1	1	100%	1 Dokumen	0	Dokumen	0%
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1 Dokumen	1	1	100%	1 Dokumen	0	Dokumen	0%
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS dan laporan pelaksanaan KLHS yang tersusun	1	dok	1 dok	1	1	100%	1 dok		dok	0%
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0	dok		0	0	0%		0		0%
2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1	dok	1 dok	1	1	100%	1 dok	0	dok	0%
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase sample pengujian berkualitas baik**	**60**	**%**	**60%**	**60**	**58**	**97%**	**60%**	**30**	**%**	**50%**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sample pengujian kualitas lingkungan	19	sampel	19 sampel	19	16	84%	19 sampel	9	sampel	47%
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	Dokumen	1 Dokumen	1	1	100%	1 Dokumen	0	Dokumen	0%
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	1 Dokumen	1	1	100%	1 Dokumen	0	Dokumen	0%

2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	Laporan	1 Laporan	1	1	100%	1	0	1	0%
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran	0		0	0		0%		0		0%
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0	Laporan	0	1	0	0%	1 Laporan	0	Laporan	0%
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase pemenuhan target RTH**	**1,08**	**%**	**1,08%**	**1,06**	**1,09**	**103%**	**1,08%**	**0,4**	**%**	**37%**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dibangun dan dikelola	15	Ha	15,481 Ha	15,481	15,481	100%	15,481 Ha	15,481	Ha	100%
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Ha	10,3 Ha	10,30	10,30	100%	10,3 Ha	10,3	Ha	100%
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7	Unit	7 Unit	7	7	100%	7 Unit	7	Unit	100%
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	15	unit	15unit	15	15	100%	15unit	15	unit	100%
5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase rincian teknis yang di verifikasi**	**75**	**75%**	**75%**	**75**	**75**	**100%**	**75%**	**40**	**75%**	**53%**
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usulan rincian teknis yang sesuai standart	1	1 dok	1 dok	1	1	100%	1 dok	1	1 dok	100%
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	1 Dokumen	1	1	100%	1 Dokumen	1	Dokumen	100%
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10	Lap	10 Laporan	10	9	90%	10 Laporan	5	Lap	50%

	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 satu daerah kabupaten /kota	1	dok	1 dok	1	1	100%	1 dok	0	dok	0%
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	Dokumen	1 Dokumen	1	1	100%	1 Dokumen	0	Dokumen	0%
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pelaksanaan rekomendasi dalam dokumen persetujuan lingkungan**	**63**	**63%**	**63%**	**63**	**62**	**98%**	**63%**	**32**	**63%**	**51%**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan / atau kegiatan yang di di awasi dan dibina	2	laporan	2 laporan	2	**2**	100%	2 laporan	1	laporan	50%
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	Dokumen	1 Dokumen	1	1	100%	1 Dokumen	1	Dokumen	100%
8	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang menjalankan pelestarian LH**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**100**	**100%**	**100%**	**50**	**%**	**50%**
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	5	lembaga/ dok	5 lembaga/2 dok	5	5	100%	5 lembaga/2 dok	5	lembaga/ dok	100%
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2	Lembaga	2 Lembaga	2	2	100%	2 Lembaga	2	Lembaga	100%

2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	Dokumen	2 Dokumen	2	2	100%	2 Dokumen	2	Dokumen	100%
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50	Orang	50 Orang	50	50	100%	50 Orang	50	Orang	100%
9	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**persentase lembaga yang mendapatkan penghargaan**	**70**	**%**	**70%**	**70**	**70**	**100%**	**70%**	**40**	**%**	**57%**
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga yang mendapatkan penghargaan	1	dok	1 dok	1	1	100%	1 dok	1	dok	100%
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5	Entitas	5 Entitas	5	5	100%	5 Entitas	5	Entitas	100%
10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**1**	**%**	**100%**	**1**	**1**	**100%**	**100%**		**%**	**0%**
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	1	dok	1 dok	1	1	100%	1 dok	1	dok	100%
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10	Pengaduan	10 Pengaduan	10	10	100%	10 Pengaduan	5	Pengaduan	50%
11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase volume sampah yang terkelola**	**70**	**%**	**70%**	**70**	**70**	**100%**	**70%**	**32**	**%**	**46%**
	Pengelolaan Sampah	volume sampah yang terkelola	500	ton	500 ton	500	500	100%	500 ton	250	ton	50%
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	120	Ton	120 Ton	120	120	100%	120 Ton	60	Ton	50%
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	500	Ton	500 Ton	500	500	100%	500 Ton	250	Ton	50%

2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6	Kelompok	6 Kelompok	6	6	100%	6 Kelompok	6	Kelompok	100%
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2	Unit	2 Unit	2	2	100%	2 Unit	2	Unit	100%
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan								0		0%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Tahun 2023 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Lingkungan Hidup, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

PROGAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99	Sangat Tinggi
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	89	Tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	97	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	96	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	98	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	98,0	Sangat Tinggi

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	100	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Berkenaan dengan tugasnya sebagai unit organisasi pengampu dalam penyusunan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup, maka ada beberapa indikator yang harus dilaksanakan. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup :

1. Prosentase Penambahan RTH perkotaan

Pemenuhan RTH perkotaan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 baru tercapai sebesar 20,30 Ha (1,06%) yaitu 20% dari Luas wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk yang seharusnya ada seluas 1.921,22 Ha. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041, Wilayah Perkotaan terdiri dari 7 Kecamatan dan dari masing-masing luasan berdasarkan Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan yang ditetapkan :

Luas Wilayah Perkotaan

No	Wilayah Perkotaan	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)
1	Nganjuk	2.884,64
2	Kertosono	1.734,86
3	Berbek	846,75
4	Pace	973,85
5	Tanjunganom	3.166,00

6	Lengkong	
7	Rejoso	
	Total Luas Wilayah Perkotaan	**9.606,10**

2. Prosentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

   Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan di wilayah perkotaan pada tahun 2023 sebesar 26.403 ton dengan timbulan sampah sebesar 52.618 ton dengan capaian (50,18 %)

3. Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R

   Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 2.780.59 ton (5,28 %). Dari Volume timbulan sampah perkotaan sebesar 52.618 ton.

Dengan data capaian tahun sebelumnya sebagaimana tabel terlampir :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	IKLH					67,8	64,9	65,1			61,84	67,37	68,38	Pada periode tahun 2021 telah dilakukan reviu Rentra dan ada beberapa indikator yang telah dilakukan perubahan
2	Indeks kualitas air			67	68				61,43	56				
3	Indeks kualitas udara			82,9	83,4				92,42	68,03				
4	Indeks kualitas tutup lahan			75	75,3				64,55	62,08				
5	Prosentase penambahan RTH perkotaan			56	57	58	59	60	52,44	53	52,46	52,46	52,47	
6	Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga			80	75	74	73	72	75	73,24	71,28	66,64	67,26	
7	Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R			20	22	24	26	27	18,75	20,62	22,51	27,29	26,1	
8	Persentase ketaatan pemilik usaha terhadap izin lingkungan					53,3	57,1	62,5			45,83	46,42	50	
9	Persentase pengaduan yang teregistrasi					100	100	100			100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil analisis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk , serta mempertimbangkan Sasaran jangka menengah pada Rentra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk maka penentuan isu - isu strategis saat ini adalah:

1. Perlunya penurunan emisa gas rumah kaca
2. Optimalisasi pengelolaan persampahan menuju Zerro waste melalui penyediaan sarana prasarana dan pelayanan persampahan
3. Penyediaan RTH Publik sesuai standart teknis

Tabel.2.5
Hubungan progam kegiatan dengan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Isu Strategis	Program	Indikator Progam	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Unit Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Perlunya penurunan emisi gas rumah kaca	Progam pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase sample pengujian berkualitas baik	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	Jumlah sample pengujian kualitas lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	

			Penanggulanga n Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Dilaksanakan	
2 Optimalisasi pengelolaan persampahan menuju zero waste melalui penyediaan sarana prasarana dan pelayanan persampahan	Progam pengelolaan persampahan	Persentase volume sampah yang terkelola	Pengelolaan Sampah	volume sampah yang terkelola	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya

					Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,pengumpulan,pengangkutan,pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	

	Progam pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)danlimbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase rincian teknis yang di verifikasi	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usulan rincian teknis yang sesuai standart	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	

			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengumpul an Limbah B3 dalam 1 satu daerah kabupaten /kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	
3 Penyediaan RTH Publik sesuai standart teknis	Progam pengelolaan keanekaragam an hayati	Persentase pemenuhan target RTH	Pengelolaan Keanekaragama n Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dibangun dan dikelola	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	

					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	
4 Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Progam peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang menjalankan pelestarian LH	Penyelenggaraa n Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
					Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	

					Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	
	Progam penghargaan lingkungan hidup	persentase lembaga yang mendapatkan penghargaan	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga yang mendapatkan penghargaan	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / DuniaPendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / DuniaPendidikan / Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam peningkatan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan upaya sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perusahaan untuk mengantisipasi dampak dari pencemaran udara dan air, mengingat saat ini Kabupaten Nganjuk merupakan kawasan industri.
b. Melakukan penanganan dan pengelolaan sampah dengan baik agar tidak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, baik udara maupun air.
c. Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau perkotaan, dengan melakukan kegiatan penambahan kawasan hijau di wilayah perkotaan yang sudah ditentukan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

a. Menurunnya kualitas air sungai
   - Belum tersedianya sarana pengolah air limbah domestik
   - Kurangnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
   - Perlu adanya regulasi/aturan tambahan
b. Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan
   - Kondisi pada saat ini sarana dan prasarana pengelolaan persampahan hanya dimiliki oleh 1 kecamatan yaitu Kecamatan Nganjuk. Jumlah TPS sebanyak 22 buah. Jumlah TPA ada 3 buah. TPS 3 R ada 1 buah di Kecamatan Nganjuk. Alat berat : Loader 1 buah ,Ekskavator 2 buah dan Buldoser 1 buah.
   - Kondisi sarana pengangkut sampah banyak yang sudah tidak layak (truck sampah), sedangkan jumlah layanan / permintaan pengangkutan sampah semakin banyak.
c. Belum optimalnya pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan

Saat ini Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki 2 orang sebagai SDM pengawas lingkungan. Diharapkan di tahun mendatang paling sedikit 7 orang yang dijadikan pengawas lingkungan hidup.

- Kurangnya jumlah pengawas lingkungan
- Kurang optimalnya Kapasitas SDM lingkungan

d. Belum optimalnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

Jumlah lembaga yang diawasi tentang pengelolaan limbah B3 yang ada di Kabupaten Nganjuk saat ini sebanyak 23 lembaga, terdiridari 5 pabrik , 5 rumah sakit,13 klinik kesehatan.

- Belum tersedianya sarana prasarana Limbah B3 dan SDM yang memadai
- Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan Limbah B3

e. Masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH)

- Kurangnya ketaatan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku
- Terbatasnya Anggaran untuk Pemenuhan RTH
- Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kawasan perkotaan yang telah ditentukan, sehingga tidak menambah luasan RTH perkotaan.

f. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

- Masih banyaknya masyarakat yang belum peduli akan kelestarian lingkungan hidup
- Masih banyaknya pengaduan tentang lingkungan hidup

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta Program Nasional / Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah "**NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"**, pelaksanaan jangka menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan ke satu yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup,serta sasaran strategis daerah yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

a. Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang
b. Menurunnya potensi sumber daya alam
c. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan
d. Adanya pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan perusakan Lingkungan

e. Perubahan iklim yang mengancam kenyamanan hidup manusia dan makluk hidup lainnya;

Sedangkan peluang yang didapatkan dalampeningkatan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

a. Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan prestasi dan kinerja industri dan masyarakat seperti Program Adipura, Adiwiyata, Kelurahan / Desa Sehat (Berseri), Proklim, Pusaka Lingkungan, Eco Pesantren, Kalpataru / PFLH
b. Adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara instansi pemerintah, pelaku usaha / kegiatan dan pemerhati lingkungan dan peran serta masyarakat
c. Adanya dukungan progam, Kegiatan dan anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik;

2.3.5. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Isu strategis pelayanan Dinas Lingkungan Hidup untuk ditindak lanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Penurunan kualitas air sungai
b. Belum optimalnya pengelolaan persampahan, penanganan limbah bahan beracun dan berbahaya dan konservasi SDA
c. Belum tercukupinya RTH publik perkotaan
d. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Produktifitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural”.**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan

analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

.

Tabel 2.6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					
						Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Dinas Lingkungan Hidup				35.949.999.982					29.774.372.513	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				35.949.999.982					29.774.372.513	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				35.949.999.982					29.774.372.513	
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	80,6 Nilai	16.129.561.842	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	80,6 Nilai	13.947.475.658	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	57.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	57.000.000	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.000.000	
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	30.000.000	
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	20.000.000	
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup	8 Laporan	8.775.513.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup	8 Laporan	8.576.382.133	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	8.763.489.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	8.564.358.133	
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.024.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.024.000	
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	7.000.000	
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan penunjang kepegawaian	94 org/pegawai	155.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan penunjang kepegawaian	94 org/pegawai	15.000.000	

	2	1 1	0 1	2.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	140.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	0	
	2	1 1	0 1	2.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	15.000.000	
	2	1 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	8 laporan	497.070.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	8 laporan	561.544.200	
	2	1 1	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	28.931.200	
	2	1 1	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.531.000	
	2	1 1	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 Paket	192.212.000	
	2	1 1	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	37.070.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	37.070.000	
	2	1 1	0 1	2.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	7.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	5.000.000	
	2	1 1	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	16.800.000	
	2	1 1	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	
	2	1 1	0 1	2.0 6	001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	8.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	6.000.000	
	2	1 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan LH Terpenuhi	14 unit	2.118.559.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan LH Terpenuhi	14 unit	134.231.200	
	2	1 1	0 1	2.0 7	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2.001.049.100	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	41.724.200	
	2	1 1	0 1	2.0 7	000 5	Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	

	2	1 1	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	67.510.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	92.507.000	
	2	1 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Urusan Dinas Sesuai Tujuan Organisasi	3 Dokumen	608.760.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Urusan Dinas Sesuai Tujuan Organisasi	3 Dokumen	1.023.196.460	
	2	1 1	0 1	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	
	2	1 1	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	331.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	749.036.460	
	2	1 1	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	269.160.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	269.160.000	
	2	1 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan LH	50 Unit	3.917.659.742	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan LH	50 Unit	3.580.121.665	
	2	1 1	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	75.000.000	
	2	1 1	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	1.878.396.742	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	1.855.570.715	
	2	1 1	0 1	2.0 9	000 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit	1.543.468.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit	1.223.319.900	
	2	1 1	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	43.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	58.500.000	
	2	1 1	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	
	2	1 1	0 1	2.0 9	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	151.795.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	167.731.050	
2	2	1 1	0 2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	80%	669.990.300	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	80%	622.846.300	
	2	1 1	0 2	2.0 1		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun	1 Dokumen	489.999.550	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun	1 Dokumen	445.795.050	
	2	1 1	0 2	2.0 1	000 2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	267.583.900	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	246.437.400	

	2	1 1	0 2	2.0 1	000 6	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	222.415.650	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	199.357.650	
	2	1 1	0 2	2.0 2		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen KLHS dan laporan pelaksanaan KLHS yang tersusun	1 dokumen	179.990.750	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen KLHS dan laporan pelaksanaan KLHS yang tersusun	1 dokumen	177.051.250	
	2	1 1	0 2	2.0 2	000 5	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	179.990.750	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	177.051.250	
3	2	1 1	0 3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase sample pengujian berkualitas baik	60%	1.227.839.368	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase sample pengujian berkualitas baik	60%	761.323.568	
	2	1 1	0 3	2.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah sample pengujian kualitas lingkungan	19 sampel	1.027.839.368	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah sample pengujian kualitas lingkungan	19 sampel	736.323.568	
	2	1 1	0 3	2.0 1	000 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	389.186.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	216.811.000	
	2	1 1	0 3	2.0 1	000 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	138.653.500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	119.512.700	
	2	1 1	0 3	2.0 1	001 5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	40 Dokumen	499.999.868	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	40 Dokumen	399.999.868	
	2	1 1	0 3	2.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran	1 kegiatan	200.000.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran	1 kegiatan	25.000.000	
	2	1 1	0 3	2.0 2	000 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	200.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	25.000.000	
4	2	1 1	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase pemenuhan target RTH	1,11%	8.022.160.202	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase pemenuhan target RTH	1,11%	5.227.491.427	
	2	1 1	0 4	2.0 1		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Luas RTH yang dibangun dan dikelola	15,481 hektar	8.022.160.202	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Luas RTH yang dibangun dan dikelola	15,481 hektar	5.227.491.427	
	2	1 1	0 4	2.0 1	000 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10,3 Ha	6.051.930.107	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10,3 Ha	3.824.032.557	
	2	1 1	0 4	2.0 1	000 7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	15 Unit	1.010.158.945	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	15 Unit	586.640.620	
	2	1 1	0 4	2.0 1	000 8	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Unit	960.071.150	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Unit	816.818.250	

5	2	1 1	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase rincian teknis yang di verifikasi	75%	450.448.320	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase rincian teknis yang di verifikasi	75%	427.699.330	
	2	1 1	0 5	2.0 1		Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah usulan rincian teknis yang sesuai standart	1 dokumen	300.448.320	Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah usulan rincian teknis yang sesuai standart	1 dokumen	277.699.330	
	2	1 1	0 5	2.0 1	000 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	150.224.110	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	138.892.160	
	2	1 1	0 5	2.0 1	000 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	150.224.210	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	138.807.170	
	2	1 1	0 5	2.0 2		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 satu daerah kabupaten /kota	1 Dokumen	150.000.000	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 satu daerah kabupaten /kota	1 Dokumen	150.000.000	
	2	1 1	0 5	2.0 2	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	150.000.000	
6	2	1 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pelaksanaan rekomendasi dalam dokumen persetujuan lingkungan	63%	200.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pelaksanaan rekomendasi dalam dokumen persetujuan lingkungan	63%	161.640.000	
	2	1 1	0 6	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan dari usaha dan / atau kegiatan yang di di awasi dan dibina	2 laporan	200.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan dari usaha dan / atau kegiatan yang di di awasi dan dibina	2 laporan	161.640.000	
	2	1 1	0 6	2.0 1	000 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	200.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	161.640.000	
7	2	1 1	0 8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase 4 1 embali/kelompok 4 1 embali4 1 at/institusi yang menjalankan pelestarian LH	100%	450.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase 4 1 embali/kelompok 4 1 embali4 1 at/institusi yang menjalankan pelestarian LH	100%	357.400.000	
	2	1 1	0 8	2.0 1		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan 4 1 embali4 1 at dan pelatihan lingkungan hidup	5 lembaga/dok	450.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan 4 1 embali4 1 at dan pelatihan lingkungan hidup	5 lembaga/dok	357.400.000	
	2	1 1	0 8	2.0 1	000 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	150.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	150.000.000	

	2	1 1	0 8	2.0 1	000 3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 Orang	150.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 Orang	150.000.000	
	2	1 1	0 8	2.0 1	000 5	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga 4 2 embali4 2 at formal/4 2 embali 4 2 embali4 2 at/komunitas/kelompok masyarakat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah 4 2 embali 4 2 embali4 2 at formal/4 2 embali 4 2 embali4 2 at/komunitas/kelompok 4 2 embali4 2 at yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	150.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga 4 2 embali4 2 at formal/4 2 embali 4 2 embali4 2 at/komunitas/kelompok masyarakat	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah 4 2 embali 4 2 embali4 2 at formal/4 2 embali 4 2 embali4 2 at/komunitas/kelompok 4 2 embali4 2 at yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	57.400.000	
8	2	1 1	0 9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		persentase 4 2 embali yang mendapatkan penghargaan	70%	150.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		persentase 4 2 embali yang mendapatkan penghargaan	70%	150.000.000	
	2	1 1	0 9	2.0 1		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		jumlah 4 2 embali yang mendapatkan penghargaan	1 Dokumen	150.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		jumlah 4 2 embali yang mendapatkan penghargaan	1 Dokumen	150.000.000	
	2	1 1	0 9	2.0 1	000 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	150.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	150.000.000	
9	2	1 1	1 0			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	150.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	150.000.000	
	2	1 1	1 0	2.0 1		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	1 Dokumen	150.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	1 Dokumen	150.000.000	
	2	1 1	1 0	2.0 1	000 4	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4 2 embali Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	150.000.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4 2 embali Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4 2 embali Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	150.000.000	
10	2	1 1	1 1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase volume sampah yang terkelola	70%	8.499.999.950	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase volume sampah yang terkelola	70%	7.968.496.230	
	2	1 1	1 1	2.0 1		Pengelolaan Sampah		volume sampah yang terkelola	500 Ton	8.499.999.950	Pengelolaan Sampah		volume sampah yang terkelola	500 Ton	7.968.496.230	
	2	1 1	1 1	2.0 1	000 4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	634.458.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	591.486.000	
	2	1 1	1 1	2.0 1	000 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	300.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	280.000.000	
	2	1 1	1 1	2.0 1	001 3	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan 4 2 embali sampah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	120 Ton	600.000.000	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan 4 2 embali sampah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	120 Ton	591.489.000	
	2	1 1	1 1	2.0 1	002 0	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	500 Ton	6.965.541.950	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	500 Ton	6.505.521.230	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan sarana prasarana persampahan	Desa Kepel	Tersedianya sarana prasarana persampahan	1 Unit	Akan kita evaluasi terkait ketersediaan lokasi kontainer sampah

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mencapai target sasaran Pembangunan tahun 2025 pada peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dengan 8 (delapan) Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalu Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Genersai Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirasi dan Mengembanhkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasasn Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkunga, Alam, dan Budaya, seta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap

tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”, adapun sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaaan”, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Target Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		1. Indeks kualitas air	Indeks	59,56
			2. Indeks kualitas udara	Indeks	80,85
			3. Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	56
		1. Meningkatnya pengelolaan persampahan	1. Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan	%	50,50
			2. Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan	%	5,35
		2. Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan	Persentase peningkatan RTH perkotaan	%	1,11

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu **"Peningkatan Produktifitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi, dengan prioritas pembangunan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri.
2. Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis Usaha Mikro, Koperasi, Ekonomi Kreatif dan
3. Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan
4. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian
6. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Dan Digitalisasi Pelayanan Publik
7. Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya

3.3.2. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah

sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tabel berikut:

Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak							
Target 6.3: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2022 (7)	Target SDGs Tahun 2023 (8)	Realisasi SDGs Tahun 2023 (9)	Status (10)
6.3.2.(b)**	Indeks kualitas air	Data IKLH	nilai	67,37	65,05	68,38	
Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan							
Target 11.6: Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2022 (7)	Target SDGs Tahun 2023 (8)	Realisasi SDGs Tahun 2023 (9)	Status (10)
11.6.1.(a)**	Persentase cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	Data IKLD	%	66,64	72	67,26	
Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertangung Jawab							
Target 12.4: Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2022 (7)	Target SDGs Tahun 2023 (8)	Realisasi SDGs Tahun 2023 (9)	Status (10)
12.4.2.(a)**	Persentase penanganan dan pengurangan timbulan sampah dan limbah B3	Data IKLD	%	22,8	28	27,7	

Target 12.5: Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2022 (7)	Target SDGs Tahun 2023 (8)	Realisasi SDGs Tahun 2023 (9)	Status (10)
12.5.1.(a)**	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R	Data IKLD	%	27,29	27	26,1	
Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim							
Target 13.2: Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2022 (7)	Target SDGs Tahun 2023 (8)	Realisasi SDGs Tahun 2023 (9)	Status (10)
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Data IKLD	dokumen	1	1	1	
Tujuan 15: Ekosistem Daratan							
Target 15.1: Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2022 (7)	Target SDGs Tahun 2023 (8)	Realisasi SDGs Tahun 2023 (9)	Status (10)
15.1.1(a)**	Indeks tutupan lahan	Data IKLD	Indeks			56.13	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dirumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Urusan Lingkungan Hidup)

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi 2025 (Rp.)
1	Pemenuhan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata pendorong konektifitas antar wilayah dan aktifitas perekonomian	35.850.000.000

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Alokasi 2024 (Rp)
1	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan	50,50	7.500.000.000
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan	5,35	950.000.000
2	Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan	Persentase peningkatan RTH perkotaan	1,11	7.997.858.000

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup**	**80,5**	**16.129.561.842**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	7.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	30.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	20.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup	8 lap	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	94 ASN	8.763.489.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.024.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	7.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang kepegawaian	94 pegawai/org	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 pkt	140.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 org	15.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	8 lap	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 pkt	30.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 pkt	50.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 pkt	100.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 pkt	37.070.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dok	7.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	15.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	250.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	8.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan LH Terpenuhi	14 unit	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 unit	2.001.049.100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	
	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	1 unit	0
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	50.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	67.510.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Urusan Dinas Sesuai Tujuan Organisasi	3 dok	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550 lap	8.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 lap	331.600.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	269.160.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan LH	50 unit	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	100.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	1.878.396.742
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 unit	1.543.468.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 uniit	43.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	200.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	151.795.000
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun**	**80%**	**669.990.300**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun	2 dok	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dok	222.415.650
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dok	267.583.900
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS dan laporan pelaksanaan KLHS yang tersusun	1 dok	
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dok	179.990.750
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 dok	
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase sample pengujian berkualitas baik**	**60%**	**1.227.839.368**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sample pengujian kualitas lingkungan	19 sampel	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	389.186.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	138.653.500
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	40 dokumen	499.999.868
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran	1 keg	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Dilaksanakan	1 Laporan	200.000.000
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase pemenuhan target RTH**	**1,08%**	**8.022.160.202**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dibangun dan dikelola	15,481 Ha	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10,3 Ha	6.051.930.107
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5,181 Ha	960.071.150
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	15unit	1.010.158.945
5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase rincian teknis yang di verifikasi**	**75%**	**450.448.320**
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usulan rincian teknis yang sesuai standart	1 dok	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dok	150.224.110

	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 laporan	150.224.210
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 satu daerah kabupaten /kota	1 dok	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dok	150.000.000
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pelaksanaan rekomendasi dalam dokumen persetujuan lingkungan**	**63%**	**200.000.000**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan / atau kegiatan yang di di awasi dan dibina	2 laporan	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan	200.000.000
7	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang menjalankan pelestarian LH**	**100%**	**450.000.000**
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	5 lembaga/2 dok	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 lembaga	150.000.000
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun thd Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dok	150.000.000
	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 org	150.000.000
8	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**persentase lembaga yang mendapatkan penghargaan**	**70%**	**150.000.000**
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga yang mendapatkan penghargaan	1 dok	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5entititas	150.000.000
9	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**100%**	**150.000.000**
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	1 dok	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 dok	150.000.000
10	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase volume sampah yang terkelola**	**70%**	**8.499.999.950**
	Pengelolaan Sampah	volume sampah yang terkelola	500 ton	
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	600.000.000
	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,pengumpulan,pengangkutan,pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	500 ton	6.965.541.950
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 kelompok	634.458.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 unit	300.000.000
Jumlah				**35.949.999.982**

Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	

NIHIL

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 apabila terdapat ketidak sesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan rencana pembangunan tahunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPD) dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi,

pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pj.BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA